

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perbankan secara umum memiliki fungsi strategi sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti penyerapan dan juga penyaluran dana dari masyarakat. Namun, pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Fungsi intermediasi perbankan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro diantaranya, tingkat bunga, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar. Faktor inflasi mencerminkan stabilitas ekonomi, jika tingkat inflasi meningkat, masyarakat cenderung mengurangi *saving/investasi*. Maka aset perbankan secara riil akan menurun, sehingga akan mempengaruhi kemampuan operasi perbankan dalam penyaluran kredit (Pariyo, 2004).

Dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah selalu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangannya diantaranya adalah perkembangan makro ekonomi, dana yang terhimpun dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK), serta *Equivalent Rate*. Bank berperan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara karena bank adalah pengumpul dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan penyalur kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana (M.S. P. Hasibuan, 2015). Bank sebagai lembaga keuangan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan PDB di Indonesia. Dana atau uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari modal pemilik bank itu sendiri maupun pinjaman dari pihak lain seperti pinjaman antar bank, akan tetapi juga berasal dari simpanan masyarakat atau dikenal dengan DPK yang bisa berupa tabungan, giro, dan deposito.

Dana pihak ketiga merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat yang diterapkan melalui produk pembiayaan. Jika Dana Pihak Ketiga (DPK) bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut.

Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan (Annisa, 2017). Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank akan dialokasikan untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah untuk menghasilkan pendapatan. Nisbah bagi hasil akan menjadi satu pertimbangan seseorang untuk menyimpan dana di bank syariah. Semakin tinggi nisbah bagi hasil yang akan diterima nasabah (mudharib) maka akan semakin tinggi pula minat untuk menyimpan dana di bank syariah. Sebaliknya, semakin rendah nisbah bagi hasil yang akan diterima nasabah maka akan semakin rendah pula keinginan masyarakat menabung di bank syariah.

Penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi makro, seperti inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar (M2), dan produk domestik bruto. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara terus menerus dari barang-barang dan jasa secara umum. Ketika terjadi inflasi, maka akan terjadi ketidakpastian kondisi ekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan uang mereka untuk konsumsi. Tingginya harga dan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dkk yang menyebutkan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap deposito bank syariah di Malaysia (Sultana, 2010).

Tabel 1.1
Data Variabel Makroekonomi dan Dana Pihak Ketiga 2016-2021

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (dalam miliar rupiah)	Uang Beredar (dalam Miliar Rupiah)	Equivalent Rate (%)	Dana Pihak Ketiga BUS (dalam Triliun Rupiah)
2016	1864275,10	5004977	4,71	206,407
2017	2007352,80	5419165	4,62	238,22
2018	2213117,80	5760046	4,64	257,61
2019	2309287,30	6136552	4,22	288,98
2020	2595481,10	6900049	3,53	322,85
2021	2697237,00	7870453	2,74	365,42

Sumber: OJK & BPS, 2016-2020 (Diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan fenomena bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga nyatanya tidak terlepas dari adanya perkembangan ekonomi makro di Indonesia dari tahun 2016-2021. Variabel makro tersebut seperti pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar dan *equivalent rate*. Dapat dilihat data pada tabel bahwa dana pihak ketiga dari tahun 2016-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jelas peningkatan ini adalah salah satu dampak langsung dari perkembangan layanan sistem perbankan syariah serta faktor pendukungnya.

Berdasarkan data pada tabel, menunjukan fenomena bahwa *equivalent rate* mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Hal ini menunjukan bahwa *equivalent rate* sebenarnya tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Karena ketika *equivalent rate* menurun, hal tersebut nyatanya tidak mempengaruhi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga tetap meningkat setiap tahunnya. Hal ini tidak sejalan dengan teori. Teori yang ada menyebutkan bahwa jika *equivalent rate* menurun, maka seharusnya dana pihak ketiga pun ikut menurun (N. Hasibuan, 2021). Akan tetapi berdasarkan data pada tabel nyatanya menunjukan bahwa ketika *equivalent rate* mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dana pihak ketiga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Selain *equivalent rate*, variabel makro ekonomi lainnya seperti jumlah uang beredar juga berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Data pada tabel menunjukan bahwa setiap tahunnya jumlah uang beredar juga mengalami

peningkatan. Menurut teori, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap ketahanan dana pihak ketiga bank syariah (Sukmana, 2016). Menurut hasil dari analisa data, nilai jumlah uang beredar menunjukkan angka negatif, yang berarti di setiap kenaikan atau bertambahnya jumlah uang beredar, maka hal ini akan menurunkan ketahanan dana pihak ketiga perbankan syariah. Peningkatan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat akan menyebabkan turunnya suku bunga kredit dan terdepresianya nilai mata uang. Penurunan pada tingkat suku bunga kredit ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat karena masyarakat akan lebih memilih untuk meminjam uang di bank daripada menabung karena biaya pinjaman yang rendah. Sehingga hal ini akan berpengaruh pada dana pihak ketiga bank syariah. Tetapi kenyataannya, data pada tabel 1.1 tidak merujuk pada teori yang ada. Saat jumlah uang beredar semakin meningkat setiap tahunnya, ternyata dana pihak ketiga juga ikut meningkat. Hal ini bertolak belakang dari teori.

Adapun pengeluaran pemerintah, yang dimana pengeluaran pemerintah ini mencerminkan kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran baik di pusat maupun di daerah. Keynes meyakini bahwa pemerintah memiliki peran yang strategis dalam menstimulasi peningkatan produksi barang dan jasa dalam 2 bentuk kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah meningkatkan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian. Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016-2020. Penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah ini apakah berpengaruh secara positif atau negatif, belum ada kesimpulan yang sama (Sinulingga, 2015). Walaupun mazhab Keynes meyakini bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong peningkatan output (pendapatan) dalam perekonomian, tetapi di sisi lain peningkatan pengeluaran pemerintah dapat memicu terjadinya defisit anggaran (Rama, 2017). Hal ini memang hal yang sangat krusial dalam pemerintahan. Dibutuhkan perencanaan yang matang sehingga semuanya tepat sasaran.

Adapun teori yang disebutkan oleh Muslim Marpaung, yang menyebutkan bahwa Ada enam variabel yaitu Produk Domestik Bruto, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar, *Equivalent Rate* dan Kurs yang saling berkaitan dan mempengaruhi Dana Pihak Ketiga, dimana semakin baiknya kondisi produk domestik bruto, pengeluaran pemerintah, tingkat bunga, jumlah uang beredar, *equivalent rate* dan kurs maka akan semakin tinggi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan. Melihat resiko dan pengaruh yang ditimbulkan oleh interaksi keenam variabel tersebut tentu saja diperlukan analisa yang lebih mendalam dibidang Ekonomi dan Perbankan Syariah. Kebiasaan ini harus terus dikembangkan dalam upaya mengantisipasi kesulitan dan kegiatan ekonomi yang masih belum sepenuhnya syariah (Muslim Marpaung, 2016).

Dalam perekonomian terbuka, selain PDB, pengeluaran pemerintah, tingkat bunga dan jumlah uang beredar, *equivalent rate*, kurs adalah salah satu indikator makro ekonomi yang banyak diteliti karena menjadi salah indikator kondisi ekonomi suatu negara. Salah satu tugas bank Indonesia adalah menjaga kestabilan nilai rupiah menunjukkan pentingnya kurs bagi suatu negara termasuk Indonesia.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap ketiga variabel tersebut dan pengaruhnya terhadap penghimpunan dana pihak ketiga telah diteliti oleh : (Hanifeliza, 2004), (Hermawan, 2010), (Arissanti, 2006), (Mubasyiroh, 2008), (Yunita, 2008), (Suharyanti, 2010), (Pranowo, 2012) dan (Julianti, 2013).

Selain itu sebuah penelitian menyatakan bahwa dalam jangka panjang, terdapat hubungan negatif antara DPK bank syariah dengan jumlah uang beredar (M2) (Sukmana, 2016). Dilanjutkan oleh penelitian lain yang menyatakan variabel *Equivalent Rate* tidak mempengaruhi variabel makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah (Khotiawan, 2018). Berbeda dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Muslim Marpaung, 2016a). Penelitian lainnya melakukan analisis tentang pengaruh variabel makroekonomi yang terdiri atas: 1) SBI, 2) Valuta Asing (USD) dan 3) SWBI terhadap dana pihak ketiga. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (DPK) (Pariyo, 2004).

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Sistem *profit sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut. Jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih *net profit* yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Alasan dipilihnya perbankan syariah adalah karena saat ini perbankan syariah telah berkembang pesat dan tumbuh tersebar di seluruh dunia, baik di negara Muslim maupun non-Muslim dan banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat karena sistemnya yang bebas dari biaya bunga. Perkembangan yang pesat ini dipicu oleh aliran dana dan meningkatnya pemahaman akan keunggulan lembaga keuangan berbasis syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Dari fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Serta melihat beberapa penelitian yang dilakukan terhadap beberapa variabel makroekonomi dan pengaruhnya terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia, dengan menambahkan variabel makroekonomi yang baru dan memperbaharui penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Uang Beredar, dan *Equivalent Rate* Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2016-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah Indonesia?
2. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah Indonesia?
3. Apakah *Equivalent Rate* berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah Indonesia?
4. Apakah pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar dan *equivalent rate* secara simultan berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *Equivalent Rate* terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar dan *equivalent rate* secara simultan Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti.
Menambah pengetahuan tentang analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, *equivalent rate* terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah Indonesia.

2. Bagi Perusahaan.

Bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal terutama dalam hal meningkatkan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK).

3. Bagi Peneliti lainnya.

Sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama, serta diharapkan dapat menghasilkan penelitian baru dalam bidang ini lebih sempurna guna pengembangan ilmu pengetahuan.

